

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

(Studi Eksperimentasi Semu pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Padang)

Zul Fadhly

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Abstract

This study aims to provide empirical evidence of the Effect of Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds Against Human Development Index in West Sumatera Province. This study uses quasi experimental design. The population in this study are all districts and municipalities that have databases in BPS West Sumatera Province associated with this research in 2012 to 2016 data data sent by BPS West Sumatra. Data obtained through the official website www.bps.go.id. Data source in this research is secondary data. Hypothesis test in this research is done by t test (t test) using SPSS 16 program.

The results of the test show that Pendapatan Asli Daerah (PAD) is not significant to Human Development Index (HDI) in West Sumatera. The General Allocation Fund (DAU) has a significant effect on the Human Development Index (HDI) in West Sumatra. The Special Allocation Fund (DAK) has a positive effect on the Human Development Index (HDI) in West Sumatra.

Keywords: IPM, PAD, DAU, DAK.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang memiliki database di BPS Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan penelitian ini pada tahun 2012 sampai 2016 dokumentasi dari data-data yang dipublikasikan oleh BPS Sumatera Barat. Data diperoleh melalui situs resmi www.bps.go.id. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t (*t-test*) menggunakan program SPSS 16.

Hasil uji menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat.

Kata kunci: IPM, PAD, DAU, DAK

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1999, reformasi di Indonesia menjadi titik tolak tumbuh kembangnya desentralisasi fiskal yang sebelumnya menganut sistem sentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini berawal dari adanya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang peran pemerintah daerah yang menjadi titik sentral dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuan dari desentralisasi antara lain: untuk melakukan efisiensi sektor publik dalam produksi dan distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal (Hardiningsih dan Oktaviani, 2013).

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah berjalan dengan baik dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report). IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara/wilayah di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau wilayah adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (BPS:Sumbar,2016).

Sumber-sumber utama keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Putra & Ulupui, 2015).

Terjadinya ketimpangan PAD antar provinsi di Indonesia, maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain-lain pendapatan yang sah.

DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010).

Selain DAU, terdapat juga DAK yang memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan,

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah. Adanya pembangunan di daerah akan mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur (Putra & Ulupui, 2015).

Menurut Sumiyati (2011), jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya, sebaliknya jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika pembangunan manusia suatu daerah berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah optimal dan harus dipertahankan agar kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat .

Berdasarkan penelitian terdahulu, factor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia antara lain adalah, dana alokasi umum, belanja pemerintah daerah, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil dan pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastu Sarkoro (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian serupa yang dilakukan oleh

Lugastoro (2013) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa rasio PAD dan rasio dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten / kota di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan pada penelitian Putra & Ulupui (2015) pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang berjudul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat** “.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat?

Berdasarkan perumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat

3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Barat.

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada peneliti, instansi pemerintah dan akademis.

B. TELAAH LITERATUR

1. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan manusia dikembangkan pada tahun 1990 oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Artaningtyas, dkk.(2011) menyatakan bahwa IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada pendapatan per kapita yang digunakan hanya untuk melihat kemajuan pembangunan.

Badan Pusat Statistik mempublikasikan mengenai Laporan Indeks Pembangunan Manusia disebutkan bahwa, Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, diwakili oleh indikator harapan hidup waktu lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dan dimensi standar

hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia.

Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak dkk, 2014). Menurut BPS (2015), IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini:

- 1) Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$).
- 2) Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ($50 < IPM < 66$).
- 3) Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ($66 < IPM < 80$).
- 4) Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$).

Dalam penelitian Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya, dan sebaliknya jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika daerah memiliki status pembangunan manusia berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah optimal dan harus dipertahankan agar kualitas sumber daya manusia tersebut produktif dan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Pendapatan Asli

Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam mengalokasikan belanja modal pemerintah daerah harus benar-benar menyesuainya dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya PAD akan menentukan besar kecilnya Belanja Modal. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya (Nuarisa 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Bratakusumah & Solihin (2002) mengartikan PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Mardiasmo (2002) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan keuangan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan Permendagri 13/2006 tentang klasifikasi PAD adalah sebagai berikut : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Soekarwo (2003 : 95) menyatakan bahwa kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, disebabkan semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan pendapatan yang bersumber dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditransfer dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan agar kemampuan keuangan antar daerah itu merata untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Halim (2004 : 141) menyatakan bahwa, "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saragih (2003 : 98) juga menyatakan bahwa : Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah, karena tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (inter governmental transfer) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

Bagi daerah yang Sumber Daya Alam (SDA)nya relative minim, maka DAU merupakan sumber pendapatan yang penting untuk mendukung operasional pemerintah tersebut dan juga sebagai sumber pembiayaan pembangunannya.”(Saragih, 2003 :104) Tujuan dari DAU selain untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (equalization) kemampuan keuangan pemerintah daerah.” (Saragih, 2003:132), “Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar”, (Sidik, 2004 : 96).

Dasar Hukum DAU

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Alokasi DAU

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbang

kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota.

4. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK (*specific grants*) merupakan jenis transferan dana yang memiliki persyaratan tertentu yang terkait di dalam bantuan tersebut. Bentuk transferan dana dari pemerintah pusat ini diberikan untuk mendorong pemerintah daerah dalam menambah barang dan jasa publik tertentu sesuai dengan program pemerintah pusat, tanpa harus membebani pembiayaan dari pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang dimaksud diatas adalah: (1) kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, dan (2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK yang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di suatu daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk

membayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tersebut. Dana Alokasi Khusus seluruhnya digunakan untuk belanja modal guna meningkatkan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk membiayai operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik diantaranya seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal, kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjutnya Abdullah dan Halim (2004) menjelaskan bahwa setiap tahun pemda biasanya melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

5. Kerangka Konseptual

a. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kemadirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya (UU No. 4/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada

kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari dalam Setyowati dan Suparwati, 2012).

PAD merupakan sumber pendanaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam hal ini, PAD sebagai pengukur pendapatan daerah sendiri yang sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Solichin, dalam (Setyowati dan Suparwati, 2012).

b. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam membiayai kegiatan daerahnya, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk menanggulangi ketimpangan fiskal tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah dengan cara pengalokasian dana yang bersumber dari APBN oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dalam rangka otonomi. DAU merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan dimana dalam pengalokasiannya mengutamakan keadilan dan pemerataan yang sejalan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (UU No. 32 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum seharusnya digunakan untuk membiayai belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tuntutan dari desentralisasi (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Irwanti (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap

Indeks Pembangunan Manusia. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Yohana (2012) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

c. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang berasal dari DAK, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut (Sarkoro dan Zulfikar, 2016:58). Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan umum. Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

A. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap persoalan yang digunakan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesis juga merupakan hasil pemikiran deduktif untuk menjawab perumusan masalah yang berdasarkan pada kajian teori. Berdasarkan kajian teori yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Desain Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen terhadap indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen.

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang memiliki database di BPS Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan penelitian ini pada tahun 2012 sampai 2016. Dan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria data yang lengkap mengenai PAD, DAU DAK dan IPM yang lengkap dari tahun 2012 sampai 2016

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dokumenter yaitu jenis data penelitian yang berupa laporan keuangan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang dipublikasikan oleh BPS Sumatera Barat pada tahun 2012-2016. Dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Kabupaten dan Kota yang terdaftar di BPS Sumatera Barat tahun 2012-2016. Sumber data diperoleh melalui situs www.bps.go.id

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dari data-data yang dipublikasikan oleh BPS Sumatera Barat. Data diperoleh melalui situs resmi www.bps.go.id atau secara

langsung meminta data ke Kantor BPS Sumatera Barat dan serta mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik di media cetak maupun elektronik.

2. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (Y). Pengukuran variabel IPM dilakukan dengan melihat angka Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Pengukuran dari setiap variabel independen tersebut dilakukan dengan menghitung rasio efektifitas.

3. Uji Asumsi Klasik

Syarat-syarat pengujian yang harus dipenuhi antara lain:

1. Uji Normalitas Residual

Uji Normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen terdistribusi secara normal atau tidak.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara variabel satu dengan variabel lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$

(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena adanya residual (kesalahan pengganggu) tak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011).

4. Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinan

Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square* karena variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Tujuan pengukuran *Adjusted R Square* adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

2. Persamaan Regresi

Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu *dependent variable* dengan dua atau lebih *independent variable*. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

3. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji Secara Serentak independen yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $sig < 0,10$, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $sig > 0,10$, menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 90% atau (α) 0,10.

4. Uji Hipotesis

Pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap variabel dependen untuk melihat nilai signifikansi masing-masing parameter yang diestimasi. Kriteria pengujianya adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $sig < 0,05$ dan β positif maka H_a diterima, H_0 ditolak
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $sig > 0,05$ dan β positif maka H_a ditolak, H_0 diterima.
- c. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 90% atau $\alpha=0,05$

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 19 Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi adalah seluruh Kabupaten/Kota tersebut.

4.1 Hasil Analisis Deskriptif

Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi *SPSS 16*. Berdasarkan data yang diolah, dapat ditampilkan ringkasan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan.

Jumlah objek yang diobservasi sebanyak 90 data, yang terdiri dari data *cross section* 18 Kabupaten/Kota dan data *time series* sebanyak 5 Tahun dari Tahun 2012-2016. Data yang diolah berupa Indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan variabel dependen, dan data pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), sebagai variabel independen.

Nilai rata-rata (*mean*) IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 sebesar 68.73 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 68.09. Sementara, range IPM daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 ditunjukkan oleh nilai minimum sebesar 56.10 yang merupakan IPM daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 79.11 yang merupakan IPM daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016. Selanjutnya, jumlah (*sum*) IPM daerah

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 berjumlah sebesar 6186.45. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2012-2016 IPM daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang mana hal tersebut berarti IPM daerah tahun sesudahnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Nilai rata-rata (*mean*) pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 sebesar 1.092 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 1.041. Range PAD daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 ditunjukkan oleh nilai minimum sebesar 0.169 yang merupakan PAD daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 1.808 yang merupakan PAD daerah Kota Pasaman Tahun 2014. Selanjutnya, jumlah (*sum*) PAD daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 berjumlah sebesar 98.313. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2012-2016 PAD daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, yang mana hal tersebut berarti PAD daerah tahun sesudahnya tidak selalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Nilai rata-rata (*mean*) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 sebesar 1.002 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 1.000. Sementara, range DAU daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 ditunjukkan oleh nilai minimum sebesar 0.935 yang merupakan DAU daerah Padang Panjang Tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 1.308 yang merupakan DAU daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015. Selanjutnya, jumlah (*sum*) DAU daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2012-2016 berjumlah sebesar 90.253. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2012-2016 DAU daerah secara garis besar telah mencapai 100 persen bahkan lebih. Hanya beberapa kab/kota yang belum mencapai nilai persentase DAU 100 persen seperti DAU kabupaten dharmasraya tahun 2014, DAU Sawahlunto tahun 2014 dan tahun 2016 dan DAU Padang panjang tahun 2012.

Nilai rata-rata (*mean*) Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 sebesar 1.001 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 1.000. Sementara, range DAK daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 ditunjukkan oleh nilai minimum sebesar 0.122 dan nilai maksimum sebesar 1.561. Selanjutnya, jumlah (*sum*) DAK daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 berjumlah sebesar 90.133. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2012-2016 DAK daerah secara garis besar belum mencapai 100 persen.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Hasil Uji Normalitas Data

Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov Smirnov bahwa nilai *probability* Kolmogorov Smirnov sebesar 0.106 lebih besar dari tingkat signifikansi yakni 0,05, sehingga asumsi normalitas residual telah terpenuhi.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut Data dikatakan multikolinearitas apabila Nilai VIF di bawah 10. Nilai VIF untuk X1, X2 dan X3 lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1.013, 1.012 dan 1.001, sehingga bisa dikatakan bahwa asumsi multikolinearitas telah terpenuhi.

4.2.3 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson yang

mana nilai durbin-watson statistic sebesar 0.416 dan berada dalam rentang $-2 < dw < 2$, maka pengujian ini tidak ada autokorelasi.

4.2.4. Hasil Heterokedistisitas

Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji Glejser. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2011). Jika indikasi heterokedistisitas terjadi, maka digunakan metode *Weighted least square* untuk mengatasi masalah tersebut.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Persamaan Regresi Linear Berganda

$$Y = 75.263 - 0.339X_1 - 10.334X_2 + 4.195X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Konstanta C sebesar 65.84543 menunjukkan bahwa jika nilai dari seluruh variabel independen, yakni PAD, DAU dan DAK adalah konstan (0), maka nilai variabel dependen IPM daerah (Y) adalah sebesar 65.84543.
- 2) Koefisien regresi negatif variabel independen PAD (X1) menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan negatif terhadap IPM daerah. Koefisien regresi sebesar -0.339 artinya setiap peningkatan 1 persen PAD daerah, maka IPM daerah akan menurun 0.339 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
- 3) Koefisien regresi negatif variabel independen DAU (X2) menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan negatif terhadap IPM daerah. Koefisien regresi sebesar -10.334 artinya setiap peningkatan 1 persen DAU daerah, maka IPM daerah akan menurun 10.334 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

- 4) Koefisien regresi positif variabel independen DAK (X3) menunjukkan bahwa DAK memiliki hubungan positif terhadap IPM daerah. Koefisien regresi sebesar 4.195 artinya setiap peningkatan 1 persen DAK daerah, maka IPM daerah akan meningkat 4.195 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

4.3.2 Hasil Uji t

Hasil Uji t (uji regresi parsial) dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dengan melihat kolom *Probability* dengan tingkat signifikansi α sebesar 5 % dapat dijelaskan:

- 1) Nilai probabilitas sebesar 0.386 lebih besar ($>$) dari 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM daerah di Sumatera Barat. Maka, **Hipotesis Alternatif 1 ($H_{a.1}$) ditolak.**
- 2) Nilai probabilitas sebesar 0.002 lebih kecil ($<$) dari 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM daerah di Sumatera Barat. Maka, **Hipotesis Alternatif 2 ($H_{a.2}$) diterima.**
- 3) Nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil ($<$) dari 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM daerah di Sumatera Barat. Maka, **Hipotesis Alternatif 3 ($H_{a.3}$) diterima.**

4.3.3 Hasil Uji F

Hasil Uji F Dengan melihat *Prob* (*F-statistic*) dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap IPM daerah.

4.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) menjelaskan bahwa nilai Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebesar 0,877. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD, DAU dan DAK mempunyai kontribusi menjelaskan IPM daerah sebesar 87,7 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini menghasilkan koefisien persamaan regresi dengan nilai sebesar -0.339 untuk variabel independen PAD. Hal ini menunjukkan PAD memiliki hubungan negatif terhadap IPM daerah. Koefisien regresi sebesar -0.399 artinya setiap peningkatan 1 persen PAD daerah, maka IPM daerah akan menurun 0.399 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Artinya semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin menurunkan IPM daerah tersebut.

Selanjutnya, hasil Uji t menunjukkan bahwa Nilai probabilitas sebesar 0.386 lebih besar ($>$) dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM daerah di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayani dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

4.4.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (equalization) kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menghasilkan koefisien persamaan regresi dengan nilai sebesar -10.334 untuk variabel independen DAU. Hal ini menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan negatif terhadap IPM daerah. Koefisien regresi sebesar 10.334 artinya setiap peningkatan 1 persen DAU daerah, maka IPM daerah akan menurun 10.334 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Semakin besar dana alokasi umum daerah maka semakin menurun indeks pembangunan manusia di daerah provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Widayani dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

4.4.3 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan manusia. Penelitian lainnya Setyowati dan Suparwati (2012) juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukkan dari DAK, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut (Sarkoro dan Zulfikar, 2016:58). Penggunaan DAK dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan umum.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dimana bentuk pengaruh PAD terhadap IPM daerah di Sumatera Barat adalah negatif, hal ini berarti bahwa kenaikan PAD Kab/Kota di Sumatera Barat akan menurunkan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Sumatera Barat. Dimana bentuk pengaruh DAU terhadap IPM daerah di Sumatera Barat adalah negatif, hal ini berarti bahwa kenaikan DAU Kab/Kota di Sumatera Barat akan menurunkan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat. Dimana bentuk pengaruh DAK terhadap IPM daerah di Sumatera Barat adalah positif, hal ini berarti bahwa kenaikan DAK Kab/Kota di Sumatera Barat akan meningkatkan Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat.

A. SARAN

1. Pada penerimaan PAD perlu dilakukan pemeriksaan yang cermat kemana pendapatan tersebut digunakan. Apakah PAD di Sumatera Barat sudah digunakan untuk keperluan daerah yang lebih tepat.

2. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat dipengaruhi oleh variabel dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Untuk itu diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah dalam meningkatkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat.

3. Dana Alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) harus dilakukan dengan cermat. Alokasinya perlu diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan sehingga tercipta efektivitas, efisiensi dan optimalitas dalam penggunaannya dan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana*

Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.

www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id. Di unduh tanggal 30 Oktober 2014.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Booklet IPM Metode Baru*, (Online), (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 24 Januari 2016).

Damayanti, Meutia Irma. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2009-2012*. Skripsi. Universitas Islam Jakarta Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Harahap, Riva Ubar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Lugastoro, DectaPriton. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Paujiah, Sri Puji. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal*. *Journal Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.

Putra, Putu Gede Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015.

- Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877.
- Sarkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.* Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 2016.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.* Prestasi Vol. 9 No. 1 – Juni 2012.
- Sumiyati, EuisEti. 2011. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat.*
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.